



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2026 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program penyusunan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Penyusunan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2026.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Kepala melalui Sekretaris Utama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160 TAHUN 2026

TANGGAL 21 APRIL 2026

DAFTAR RANCANGAN

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis	Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dengan mengakomodir materi muatan prasarana dan sarana kearsipan yang diatur dalam: 1. Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif, 2. Kepka ANRI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip, Kepka ANRI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Box Arsip,	Direktorat Kearsipan Pusat

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Kepka ANRI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip dan 4. Perka ANRI No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip/Dokumen Permanen.	
2.	Pedoman Penyusunan Program Arsip Vital	Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.	Direktorat Kearsipan Pusat
3.	Pedoman Retensi Arsip	Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Simplifikasi terhadap 48 Peraturan Kepala ANRI yang mengatur mengenai Pedoman Retensi Arsip dan menetapkan urusan pemerintah dalam pedoman retensi arsip yang saat ini belum ada yang meliputi Pangan, Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan.	Direktorat Kearsipan Daerah II

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.	Direktorat Kearsipan Daerah I
5.	Pengelolaan Arsip Terjaga	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga.	1. Direktorat Kearsipan Daerah I 2. Direktorat Penyelamatan Arsip 3. Direktorat Sistem Kearsipan
6.	Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi	Direktorat Kearsipan Pusat

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Pedoman Penyusutan Arsip	Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip	Direktorat Kearsipan Daerah I
8.	Akuisisi Arsip Statis	Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.	Direktorat Penyelamatan Arsip
9.	Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara, Perangkat Daerah dan BUMN	Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah.	Direktorat Penyelamatan Arsip

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	Imbalan Penyerahan Arsip Statis	Pasal 95 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI No. 36 Tahun 2015 tentang Imbalan Penyerahan Arsip Statis.	Direktorat Penyelamatan Arsip
11.	Preservasi Arsip Statis	Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi terhadap Peraturan ANRI ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis dimana termasuk materi muatan tentang fumigasi dan pengendalian hama terpadu.	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip
12.	Pembentukan Depot Arsip Statis	Pasal 139 ayat (4) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor	Revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip	Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
13.	Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan ANRI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
14.	Pengelolaan Arsip Elektronik	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik	Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan
15.	<i>Grand Design</i> Sistem Informasi Kearsipan Nasional	Rencana Strategis ANRI Tahun 2025-2029	Pokok materi muatan antara lain: 1. Sinkronisasi arah kebijakan SIKN dengan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. 2. Arsitektur Proses Bisnis Kearsipan Nasional. 3. Arsitektur Data dan Informasi. 4. Arsitektur Layanan Pengguna (<i>user</i>) Data dan Informasi.	Direktorat Sistem Kearsipan

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			5. Arsitektur Aplikasi SIKN (Dinamis/SRIKANDI dan Statis/SIKS, SIKN-JIKN). 6. Arsitektur Infrastruktur TIK (Pusat Data Nasional). 7. Arsitektur Penyimpanan (<i>Storage</i>) Data dan Informasi. 8. Arsitektur Keamanan Data dan Informasi. 9. Arsitektur Manajemen Sumber Daya Manusia (peran dan kompetensi ASN) Dalam Pengelolaan SIKN (data, layanan, aplikasi, infrastruktur, <i>storage</i> atau penyimpanan, dan keamanan). 10. Pembagian kewenangan (fungsi Kelembagaan) yang jelas antara ANRI (sebagai pengelola Pusat Jaringan) dan Instansi Pusat/Daerah) 11. Standar interoperabilitas dan bagi pakai data kearsipan dan keterkaitannya dengan SDI.	

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			12. Peta Jalan Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi serta Prioritas Sistem Informasi Kearsipan Nasional 13. Mekanisme Audit dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional. 14. Pendanaan	
16.	Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang	1. Ruang Lingkup pedoman dalam rangka mengatur tentang penyusunan rekomendasi kebijakan yang berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 2. Sasaran, meliputi: a. Memberikan acuan yang seragam bagi penyusun kebijakan dalam membuat rekomendasi, sehingga hasilnya konsisten, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Memastikan bahwa proses penyusunan rekomendasi dapat ditelusuri dan diaudit, sehingga publik	Direktorat Sistem Kearsipan

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Jabatan Fungsional Di Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	dan pemangku kepentingan dapat memahami dasar pemikiran di balik suatu kebijakan; c. Memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih, memperkuat kapasitas penyusun kebijakan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih efektif, akuntabel, dan kontekstual; d. Memastikan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan dapat terwujud antar unit kerja di lingkungan ANRI, maupun dengan pihak eksternal. 3. Tahapan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan; 4. Jenis Rekomendasi Kebijakan; 5. Sistematika Rekomendasi Kebijakan.	
17.	Pengawasan Kearsipan	Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
18.	Akreditasi Kearsipan	Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala ANRI No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan	Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan
19.	Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan ANRI	Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Inspektorat

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ANRI	Pasal 213 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Biro Kepegawaian dan Umum
21.	Manajemen Talenta	Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Manajemen Talenta Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Biro Kepegawaian dan Umum
22.	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan ANRI	Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di	Biro Kepegawaian dan Umum

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Arsip Nasional Republik Indonesia	Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	
23.	Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan ANRI	Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia	Biro Kepegawaian dan Umum
24.	Klasifikasi Arsip , Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan ANRI	Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi dan penyempurnaan terhadap: 1. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;	Biro Kepegawaian dan Umum

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.	
25.	Peta Proses Bisnis ANRI	Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi
26.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan	Pokok materi muatan antara lain: 1. Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi 2. Jenis Dokumen dan Informasi Hukum 3. Tata Cara Pengelolaan	Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Informasi Hukum Nasional	4. Sarana dan Prasarana 5. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pembiayaan	

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO